

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pengembangan sebuah usaha di suatu wilayah dengan memberikan beberapa kontribusi seperti menciptakan peluang kerja. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat berperan dalam pengembangan UMKM. Luasnya pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah tercermin dari kontribusinya terhadap berbagai unit usaha dan penyerapan tenaga kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 mengatur dalam Bab 1, Pasal 2, Ayat 1 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan UMKM sesuai dengan kapasitasnya. Ayat (2) kemudian menyebutkan bahwa pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan perusahaan, kemitraan, perizinan, serta koordinasi dan pengelolaan.

UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa :

- a) Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- b) Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah ataupun Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c) Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan atau hasil penjualan tahunan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Berikut Tabel 1.1 menjelaskan mengenai klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 yaitu tentang UMKM :

Tabel 1.1
Klasifikasi UMKM

Ukuran Usaha	Asset	Omset
Usaha Mikro	Minimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	Maksimal 3 Miliar
Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Milliar	>2,5 – 50 Milliar

Sumber: UU No. 20/2008

Dibalik capaian-capaian yang telah diraih dan ditunjukkan oleh pelaku UMKM, teridentifikasi masih ditemukan beragam persoalan yang tentunya perlu mendapat

perhatian dari semua pihak. Pada UMKM peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap pengembangan UMKM tersebut. Menurut Tristiarto dkk., (2021) menjelaskan bahwa peran pemerintah sangat berpengaruh dalam pengembangan sektor UMKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan.

Selain peran pemerintah dalam pengembangan UMKM, terdapat variabel lain yang berpengaruh terhadap pengembangan UMKM yaitu variabel inovasi. Dalam bidang usaha juga diperlukan inovasi dengan tujuan untuk menciptakan hasil yang lebih baik lewat produk yang baru dibuat, pelayanan baru, perubahan proses operasional dan manajerial, perubahan organisasi bahkan perubahan di sistem pemasaran pasar.

Terdapat variabel lain yang berpengaruh terhadap pengembangan UMKM yaitu literasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (2014) menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mengetahui fungsi dari pelayanan jasa industri keuangan. Literasi keuangan merupakan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pelaku UMKM sebagai acuan maupun ilmu dalam mengelolah dan merencanakan keuangan tiap dalam pengembangan UMKM. Menurut Muraga dkk., (2015) menjelaskan bahwa dengan literasi keuangan yang baik, pengusaha mampu untuk menggunakan kemampuan di

bidang keuangan dalam pengambilan berbagai keputusan yang tepat untuk perusahaan mereka.

Kemudian terdapat variabel lain yang berpengaruh terhadap pengembangan UMKM yaitu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah cara mengelolah uang yang diperoleh selama berjalannya usaha yang kita kelola dengan tujuan agar dapat terpenuhi segala kebutuhan usaha dikemudian hari. Menurut Suindari (2020) menjelaskan bahwa latar belakang penelitian ini yakni untuk menghasilkan kinerja yang baik pelaku UMKM harus tahu bagaimana cara mengelola keuangan usahanya. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Rizki (2018) menjelaskan bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti praktik pengelolaan keuangan UMKM dengan menggunakan empat komponen yaitu: praktik manajemen modal kerja, manajemen struktur modal, informasi akuntansi dan praktik pelaporan keuangan, dan penggunaan teknik penganggaran modal dan manajemen aset tetap.

Berikut Tabel 1.2 pertumbuhan UMKM diwilayah Yogyakarta berdasarkan data dari web bappeda.jogja. Data ini di ambil dari jumlah pertumbuhan UMKM diwilayah Yogyakarta dari tahun 2015-2021 mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya:

Tabel 1.2
Pertumbuhan UMKM diwilayah Yogyakarta

Tahun	UMKM	Pertumbuhan
2015	218.012	0,0%
2016	226.211	3,8%

2017	235.313	4,0%
2018	246.083	4,6%
2019	248.499	1,0%
2020	277.677	11,7%
2021	329.719	18,7%

Sumber: bappeda.jogjaprov.go.id

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas bappeda Jogja melakukan survey terhadap perkembangan UMKM di Yogyakarta, pada tahun 2015 Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat pertumbuhan UMKM mencapai 0,0%. Pada tahun 2016 Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat pertumbuhan UMKM mencapai 3,8%. Pada tahun 2017 Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat pertumbuhan UMKM mencapai 4,0%. Pada tahun 2018 Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat pertumbuhan UMKM mencapai 4,6%. Pada tahun 2019 Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat pertumbuhan UMKM mencapai 1,0%. Pada tahun 2020 Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat pertumbuhan UMKM mencapai 11,7%. Pada tahun 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat pertumbuhan UMKM mencapai 18,7%. Tingkat pertumbuhan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami peningkatan dan penurunan. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (*bappeda*) Daerah Istimewa Yogyakarta karena telah memberikan edukasi literasi keuangan terhadap masyarakat maupun pelajar.

Berikut Tabel 1.3 pertumbuhan UMKM diwilayah Kabupaten Sleman berdasarkan data dari web bappeda.jogja. Data ini di ambil dari jumlah pertumbuhan UMKM diwilayah Kabupaten Sleman dari tahun 2017-2021 yang kurang stabil:

Tabel 1.3
Pertumbuhan UMKM diwilayah Kabupaten Sleman

Tahun	UMKM	Pertumbuhan
2017	31.012	0,0%
2018	31.012	0,0%
2019	41.852	35,0%
2020	51.012	21,9%
2021	90.170	76,8%

Sumber: bappeda.jogjaprov.go.id

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas bappeda jogja melakukan survey terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Sleman, pada tahun 2017 daerah Kabupaten Sleman tingkat pertumbuhan UMKM mencapai 0,0%. Pada tahun 2018 daerah Kabupaten Sleman tingkat pertumbuhan UMKM mencapai 0,0%. Pada tahun 2019 daerah Kabupaten Sleman tingkat pertumbuhan UMKM mencapai 35,0%. Pada tahun 2020 daerah Kabupaten Sleman tingkat pertumbuhan UMKM mencapai 21,9%. Pada tahun 2021 daerah Kabupaten Sleman tingkat pertumbuhan UMKM mencapai 76,8%. Jumlah tingkat pertumbuhan UMKM di daerah Kabupaten Sleman kadang mengalami kenaikan maupun penurunan disetiap tahunnya. Ini merupakan pencapaian yang sangat tidak baik bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (*bappeda*) daerah Kabupaten Sleman karena edukasi

literasi keuangan yang telah diberikan kepada masyarakat kurang maksimal sehingga hasil pengembangan UMKM tidak membuahkan hasil yang baik, oleh sebab itu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (*bappeda*) harus memberikan edukasi yang lebih baik lagi agar hasil pengembangan UMKM di daerah Kabupaten Sleman membuahkan hasil yang lebih baik.

Pengertian pendidikan menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 yaitu segala sesuatu dalam bentuk usaha untuk membina kepribadian serta menambah wawasan masyarakat Indonesia, baik secara jasmani maupun rohani yang berlangsung seumur hidup, serta didalam dan diluar sekolah dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila. Dalam pengertiannya pendidikan memiliki makna yaitu usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Ihsan, (2015) menjelaskan bahwa bagaimanapun peradaban suatu masyarakat, di dalamnya berlangsung dan terjadi suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya. Sedangkan pendapat menurut Mudyaharjo (2016) menjelaskan bahwa Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup.

Istinganah, (2019) menjelaskan bahwa hal ini mengajarkan bahwa pendidikan memiliki dampak positif kepada produktivitas usaha, yakni semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pengusaha maka akan semakin tinggi juga tingkat produktivitas usaha yang akan diciptakan dan dapat dilihat dari jumlah pendapatan

yang diperoleh. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Nazaruddin, (2018) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin banyak pula pengetahuan, pengalaman, wawasan serta keterampilan yang diperoleh, begitupun sebaliknya. Maka jika seorang wirausaha memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan memudahkannya untuk mengembangkan usaha yang dimiliki karena sudah memiliki banyak pengalaman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2019), menjelaskan bahwa peran pemerintah berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Tristiarto dkk., (2021) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM. Namun, penelitian Nirwana (2017), menjelaskan bahwa peran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembangan UMKM di kabupaten Enrekang. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aribawa (2016), menjelaskan bahwa inovasi berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ignatia dkk., (2021) menjelaskan bahwa inovasi berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM. Namun, penelitian Iyulinda (2021) menjelaskan bahwa inovasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembangan UMKM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pratama (2019), menjelaskan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Iyulinda (2021), menjelaskan bahwa inovasi berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM. Namun, penelitian Tristiarto (2021), menjelaskan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembangan UMKM.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2014) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM. Hal tersebut sejalan dengan penelitian menurut Puspita (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM. Namun, penelitian Anggraeni (2015), menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembangan UMKM di daerah Depok. Dalam variabel tingkat pendidikan menurut Dewi (2022), menjelaskan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Istinganah (2019), menjelaskan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM. Namun penelitian Imtihan, dkk (2018) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembangan UMKM di kota Padang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Peran Pemerintah, Inovasi, Literasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Sleman”**.

Hal tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat dengan mengetahui bagaimana perkembangan UMKM di Kabupaten Sleman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah peran pemerintah berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sleman?
2. Apakah inovasi berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sleman?
3. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sleman?
4. Apakah pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sleman?
5. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sleman?
6. Apakah peran pemerintah, inovasi, literasi keuangan, pengelolaan keuangan dan tingkat pendidikan secara bersama berpengaruh terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah peran pemerintah berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sleman.
2. Untuk menguji secara empiris apakah inovasi berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sleman.
3. Untuk menguji secara empiris apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sleman.
4. Untuk menguji secara empiris apakah pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sleman.
5. Untuk menguji secara empiris apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sleman.
6. Untuk menguji secara empiris apakah peran pemerintah, inovasi, literasi keuangan, pengelolaan keuangan, dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu akuntansi keuangan yakni sebagai acuan yang bisa memberikan informasi secara teoritis maupun empiris bagi pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini sangat berguna untuk peneliti karena memiliki tujuan untuk menambah wawasan, maupun meningkatkan pengetahuan peneliti dalam bidang keuangan.
- b. Bagi UMKM di Kabupaten Sleman, Dengan adanya penelitian ini, para pelaku UMKM juga dapat meningkatkan pemahaman dalam bidang keuangan, kualitas maupun kreativitas agar semakin meningkat.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti di masa mendatang serta dapat dipergunakan sebagai bahan pembanding dengan penelitian-penelitian di masa mendatang.